

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad. 2016. Daftar nama daerah kabupaten kota di Sumsel. <http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/daftar-nama-daerah-kota-kabupaten-di-sumsel.html>. Diakses Selasa, 07/07/2017 3:07 WIB.
- Aji, Wahyu. 2016. Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia. <http://www.laskarncc.com/2016/04/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia.html>. Diakses Selasa, 07/02/2017 12:42 WIB.
- Ariessa, Permata Bowta. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal*.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi*.
- Fontanella dan Rossieta. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal*. Diakses Senin, 03/04/2017 16.00 WIB. [https://www.academia.edu/12551836/PENGARUH_DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA?auto=download](https://www.academia.edu/12551836/PENGARUH_DESENTRALISASI_FISKAL_DAN_KINERJA_TERHADAP_AKUNTABILITAS_PELAPORAN_KEUANGAN_PEMERINTAH_DAERAH_DI_INDONESIA?auto=download). Diakses Senin, 03/04/2017 16.00 WIB.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21 Update PLS Regresi, Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto Dedy Tri. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Jambi .*Tesis*. Universitas Indonesia. Diakses Selasa, 07/02/2017 12:50 WIB. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298010-T30034-Dampak%20desentralisasi.pdf>.
- Hutabarat dan Sriyono. 2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal*. Diakses Rabu, 08/02/2017 13:25 WIB. <http://e-journal.uajy.ac.id/8945/1/JURNAL.pdf>.
- Khalid Idham. 2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal*. Diakses Rabu, 08/02/2017 13:10 WIB. <http://lp3m.unismuh.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/Pengaruh-Desentralisasi-Fiskal-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Sulawesi-Selatan.pdf>.

Kurniawan Dhani. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Vol 7 No.2.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mudhofar dan Tahar. 2016. Pengaruh Desentralisasi dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia; Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 17 No.2.

Nordiawan dan Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Priyatno, Duwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tentang Keuangan Negara.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.

_____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pinjaman Daerah.

_____. 2007. Peraturan Pemerintah No. 3 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

_____. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

_____. 2008. Peraturan Pemerintah No. 6 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

_____. 2009. Peraturan Pemerintah No. 73 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah.

_____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintah Daerah.

_____. 2015. Undang-Undang Nomor 9 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Situngkir, Sirojuzilam, Erlina, dan Suriadi. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom.* Vol 17, No 3. Juli 2014.

Vinda Erryana dan Hendri Setyawan. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia.* Vol 5 No.1 Januari 2016.

Yenny. 2013. Prinsip-Prinsip Good Governance. Universitas Mulawarman. *eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2013, 1 (2): 196-209.*

Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Tesis.* Universitas Dipenogoro. http://eprints.undip.ac.id/23796/1/Aan_Zulyanto.pdf. Diakses Rabu 08/02/2017 14:20 WIB.

<http://kbbi.web.id/realisasi>. “pengertian Realisasi”. Diakses Minggu, 18/06/2017 10.00 WIB.